

**INTERNALISASI KETAATAN RELIGIUS SEBAGAI LEGITIMASI
KEKUASAAN: STUDI KASUS AMBRUKNYA PONDOK
PESANTREN AL-KHOZINY SIDOARJO**

Achmad Nauval Wildan¹, Agus Machfud Fauzi²

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya^{1,2}

Email: 24040564138@mhs.unesa.ac.id¹, agusmfauzi@unesa.ac.id²

Abstract

This study examines the relationship between religious obedience and power within religious institutions, focusing on the collapse of the Al Khoziny Islamic boarding school in Sidoarjo. The objective of this research is to analyze how the internalization of religious obedience functions as a form of power legitimation for religious authorities and its implications for social relations and institutional governance within pesantren. This study employs a qualitative approach using a sociological case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis, and were analyzed descriptively and qualitatively using Max Weber's theory of power legitimacy and Pierre Bourdieu's concept of symbolic domination. The findings indicate that the strong internalization of religious obedience reinforces the charismatic authority of the kiai and produces hierarchical and asymmetrical social relations between leaders and santri. When religious obedience is not accompanied by critical awareness, transparency, and accountability, such legitimacy may obscure structural and ethical weaknesses in institutional management, ultimately leading to a crisis of trust and institutional disintegration. This study emphasizes the importance of balancing religious obedience with social control to prevent religious values from becoming instruments of power domination.

Keywords: *sociology of religion, religious obedience, power legitimacy, Islamic boarding schools*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relasi antara ketaatan religius dan kekuasaan dalam konteks lembaga keagamaan, dengan studi kasus ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses internalisasi ketaatan religius dapat berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan otoritas keagamaan serta implikasinya terhadap relasi sosial dan tata kelola kelembagaan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori legitimasi kekuasaan Max Weber dan konsep dominasi simbolik Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi ketaatan religius yang kuat memperkuat otoritas karismatik kiai dan membentuk relasi sosial yang hierarkis serta asimetris antara pemimpin dan santri. Ketika ketaatan religius tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, transparansi, dan akuntabilitas, legitimasi tersebut berpotensi menutupi kelemahan struktural dan etis dalam pengelolaan pesantren, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan dan disintegrasi kelembagaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara ketaatan religius dan kontrol sosial agar nilai-nilai agama tidak berubah menjadi instrumen dominasi kekuasaan.

Kata kunci: *sosiologi agama, ketaatan religius, legitimasi kekuasaan, pesantren.*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter religius, moralitas, serta struktur sosial masyarakat. Keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai ruang pembentukan otoritas keagamaan yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan santri dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pesantren dapat dipahami sebagai institusi sosial-keagamaan yang di dalamnya berlangsung relasi antara nilai, otoritas, dan kekuasaan. Dalam kehidupan pesantren, figur kiai menempati posisi sentral sebagai pemimpin spiritual, pendidik, dan pemegang otoritas tertinggi. Kiai dipandang memiliki keilmuan agama, integritas moral, serta kedalaman spiritual yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinannya. Relasi antara kiai dan santri dibangun di atas nilai ketaatan, kepatuhan, dan penghormatan yang kuat, yang dalam tradisi pesantren sering dimaknai sebagai bagian dari adab dan etika religius. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui proses pendidikan, keteladanan, serta praktik keseharian di lingkungan pesantren.

Internalisasi ketaatan religius pada dasarnya bertujuan membentuk karakter santri agar memiliki sikap tawadhu', disiplin, dan patuh terhadap ajaran agama. Namun, dalam praktik sosial tertentu, internalisasi nilai ketaatan tidak selalu berjalan secara ideal. Ketika ketaatan religius dipahami secara absolut dan tidak disertai dengan ruang refleksi kritis, maka nilai tersebut berpotensi mengalami pergeseran fungsi. Ketaatan tidak lagi sekadar menjadi ekspresi kesalehan individual, tetapi dapat bertransformasi menjadi mekanisme legitimasi kekuasaan yang bersifat simbolik. Dalam perspektif sosiologi agama, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan, melainkan juga sebagai struktur sosial yang berkelindan dengan relasi kuasa. Max Weber menjelaskan bahwa otoritas religius sering kali memperoleh legitimasi melalui basis tradisional dan karismatik, di mana kepatuhan muncul karena keyakinan terhadap kualitas moral dan spiritual pemimpin. Sementara itu, Pierre Bourdieu menegaskan bahwa kekuasaan dapat bekerja secara halus melalui dominasi simbolik, yakni melalui bahasa, simbol, dan nilai yang diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Kerangka ini relevan untuk membaca dinamika kekuasaan di pesantren, khususnya dalam konteks internalisasi ketaatan religius.

Kasus ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo menjadi konteks

empiris yang penting untuk memahami relasi antara ketaatan religius dan kekuasaan. Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial pesantren sebagai lembaga yang selama ini dipersepsikan sakral, aman, dan terbebas dari praktik kelalaian struktural. Persepsi tersebut terbentuk melalui konstruksi simbolik yang menempatkan pesantren sebagai ruang religius yang dianggap berada di luar logika pengawasan publik dan kontrol sosial yang ketat. Dalam kondisi seperti itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh otoritas pesantren cenderung diterima tanpa proses verifikasi kritis. Santri dan masyarakat sekitar sering kali menempatkan diri sebagai pihak yang harus patuh dan menerima, alih-alih sebagai subjek yang memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan lembaga. Pola relasi semacam ini memperlihatkan bagaimana internalisasi ketaatan religius tidak hanya membentuk kesalehan personal, tetapi juga membangun struktur sosial yang timpang dan rentan terhadap penyalahgunaan otoritas.

Lebih lanjut, kasus ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip modern mengenai keselamatan, akuntabilitas, dan tata kelola lembaga. Ketika legitimasi religius dijadikan dasar utama pengambilan keputusan, aspek teknis dan rasional sering kali ditempatkan pada posisi sekunder. Akibatnya, risiko-risiko struktural yang seharusnya dapat diantisipasi menjadi terabaikan, hingga akhirnya memunculkan krisis yang berdampak luas. Konteks inilah yang menjadikan kajian terhadap pesantren Al Khoziny relevan tidak hanya sebagai studi kasus lokal, tetapi juga sebagai refleksi terhadap dinamika kelembagaan pesantren di Indonesia secara umum. Pesantren sebagai institusi sosial keagamaan menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan nilai ketaatan religius dengan kebutuhan akan transparansi, profesionalisme, dan perlindungan terhadap hak-hak santri. Analisis terhadap kasus ini diharapkan mampu membuka ruang diskusi yang lebih kritis mengenai masa depan pengelolaan pesantren di tengah tuntutan perubahan sosial.

Dalam realitas sosial Indonesia saat ini, pesantren mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah santri, perluasan fungsi kelembagaan, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan dan keselamatan. Banyak pesantren berkembang secara cepat, baik dari sisi fisik bangunan maupun jumlah peserta didik, namun tidak selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas manajerial, standar keselamatan, dan sistem pengawasan yang memadai. Kondisi ini menciptakan kerentanan struktural, terutama ketika pengelolaan pesantren masih sangat bergantung

pada otoritas personal kiai tanpa dukungan sistem kelembagaan yang profesional. Di sisi lain, budaya ketaatan yang mengakar kuat dalam tradisi pesantren sering kali membentuk relasi sosial yang timpang antara pengelola, santri, dan masyarakat. Santri dibiasakan untuk menerima keputusan kiai sebagai kebenaran moral yang tidak perlu dipertanyakan, sementara orang tua dan masyarakat sekitar cenderung menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan dan keselamatan anak kepada pihak pesantren. Dalam banyak kasus, relasi semacam ini membuat mekanisme kontrol sosial menjadi lemah, karena kritik dan pengawasan dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpatuhan atau bahkan pelanggaran terhadap nilai religius. Realitas tersebut diperkuat oleh minimnya keterlibatan negara dalam pengawasan internal pesantren, khususnya pesantren swasta yang dikelola secara mandiri. Meskipun pemerintah memiliki regulasi terkait standar pendidikan dan keselamatan, implementasinya sering kali bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek relasi kekuasaan di tingkat kelembagaan. Akibatnya, pesantren berada dalam posisi ambigu, yakni di satu sisi dihormati sebagai institusi religius yang otonom, namun di sisi lain kurang mendapatkan pendampingan dan pengawasan yang memadai dalam aspek tata kelola.

Dalam konteks inilah, kasus Pondok Pesantren Al Khoziny tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai cerminan dari persoalan struktural yang lebih luas dalam pengelolaan pesantren di Indonesia. Peristiwa ambruknya bangunan pesantren merepresentasikan akumulasi dari berbagai persoalan, mulai dari dominasi otoritas religius, lemahnya sistem pengawasan, hingga absennya budaya kritik yang sehat. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menghadirkan perspektif sosiologis yang tidak hanya melihat pesantren sebagai simbol kesalehan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang perlu dibaca secara kritis dan kontekstual. Peristiwa tersebut tidak hanya menunjukkan adanya persoalan teknis dalam pengelolaan bangunan pesantren, tetapi juga membuka ruang analisis terhadap lemahnya kontrol sosial dan minimnya ruang kritik dalam struktur kelembagaan pesantren. Kuatnya legitimasi religius yang dimiliki otoritas pesantren diduga berkontribusi terhadap sikap pasrah dan penerimaan tanpa pertanyaan dari santri maupun masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana internalisasi ketaatan religius berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan dalam konteks pesantren, serta bagaimana mekanisme tersebut berimplikasi

pada krisis kelembagaan dan kepercayaan publik. Dengan menjadikan Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo sebagai studi kasus, penelitian ini berupaya membaca secara kritis relasi antara nilai religius, otoritas kiai, dan struktur kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan pesantren.

Lebih jauh, penelitian ini penting dilakukan karena kajian mengenai pesantren selama ini cenderung menempatkan lembaga tersebut dalam kerangka normatif dan ideal, yakni sebagai pusat pendidikan moral dan spiritual yang bersifat harmonis. Pendekatan semacam ini sering kali mengabaikan realitas sosial pesantren sebagai arena kontestasi kepentingan, relasi kuasa, dan praktik dominasi simbolik. Padahal, dalam konteks sosial tertentu, legitimasi religius yang kuat justru dapat menutup ruang kritik dan mengaburkan persoalan struktural yang berpotensi merugikan santri maupun masyarakat. Selain itu, meningkatnya perhatian publik terhadap akuntabilitas lembaga keagamaan menuntut adanya kajian akademik yang mampu menjembatani nilai-nilai religius dengan prinsip tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Kasus ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny menjadi contoh konkret bagaimana absennya kontrol sosial dan mekanisme evaluasi dapat berujung pada krisis legitimasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi sosial dalam mendorong praktik pengelolaan pesantren yang lebih reflektif dan berkeadilan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah sosiologi agama dengan menghadirkan analisis kritis tentang internalisasi ketaatan religius sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan. Sementara secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pengelola pesantren, santri, dan masyarakat dalam membangun relasi religius yang tidak hanya berlandaskan kepatuhan, tetapi juga kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial di Indonesia.

Dalam lanskap sosial-keagamaan Indonesia, pesantren menempati posisi yang unik sekaligus strategis. Ia bukan sekadar lembaga pendidikan berbasis agama, tetapi juga ruang sosial tempat nilai, otoritas, dan kepercayaan diproduksi serta direproduksi secara berkelanjutan. Keberadaan pesantren sering kali dipahami sebagai simbol moralitas dan kesalehan kolektif, sehingga relasi sosial yang berlangsung di dalamnya cenderung ditempatkan dalam kerangka ideal dan normatif. Pandangan ini membuat pesantren kerap dipersepsikan sebagai institusi yang “aman secara moral”, sehingga luput dari pembacaan kritis sebagai organisasi sosial yang juga berhadapan dengan persoalan

manajemen, risiko, dan tanggung jawab publik. Perubahan sosial yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir membawa pesantren pada posisi yang semakin kompleks. Peningkatan jumlah santri, perluasan fungsi pendidikan, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan menjadikan pesantren tidak lagi beroperasi dalam skala kecil dan sederhana. Banyak pesantren berkembang menjadi lembaga besar dengan ribuan santri dan infrastruktur yang luas. Namun, pertumbuhan kuantitatif tersebut tidak selalu diiringi dengan transformasi cara pengelolaan yang sejalan dengan kompleksitas risiko yang dihadapi. Di sinilah pesantren menghadapi tantangan struktural, yakni bagaimana mempertahankan nilai religius sekaligus menjamin keselamatan dan keberlanjutan kelembagaan.

Di tengah kondisi tersebut, hubungan kepercayaan antara masyarakat, santri, dan pesantren menjadi faktor penentu. Kepercayaan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga religius. Orang tua menyerahkan anaknya kepada pesantren dengan keyakinan bahwa lembaga tersebut mampu memberikan perlindungan moral dan fisik. Kepercayaan tersebut sering kali dibangun atas dasar reputasi religius, bukan atas evaluasi terhadap sistem pengelolaan yang bersifat teknis. Akibatnya, pesantren berada dalam posisi yang relatif otonom dari pengawasan eksternal, karena legitimasi religiusnya telah cukup untuk memperoleh penerimaan sosial. Kondisi ini menciptakan paradoks kelembagaan. Di satu sisi, pesantren dipandang sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai etika dan tanggung jawab moral. Namun di sisi lain, absennya mekanisme evaluasi yang terbuka membuat potensi masalah struktural sulit terdeteksi sejak dini. Dalam situasi seperti ini, persoalan keselamatan, kualitas fasilitas, dan tata kelola sering kali dianggap sebagai urusan internal yang tidak layak dipertanyakan oleh pihak luar. Persepsi tersebut diperkuat oleh anggapan bahwa kritik terhadap pesantren berpotensi merusak harmoni religius dan mencederai wibawa lembaga keagamaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ruang pendidikan, melainkan sebagai institusi sosial yang beroperasi melalui logika kepercayaan simbolik. Logika ini membuat pesantren memiliki daya legitimasi yang tinggi, namun sekaligus rentan terhadap persoalan akuntabilitas. Ketika kepercayaan sosial terlalu bergantung pada simbol religius dan figur otoritatif, aspek teknis dan rasional cenderung berada di posisi pinggiran. Padahal, dalam konteks kelembagaan modern, keberlanjutan sebuah institusi sangat bergantung pada

keseimbangan antara nilai normatif dan sistem pengelolaan yang terukur.

Kasus ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo menjadi peristiwa penting yang mengguncang asumsi publik tentang pesantren sebagai ruang yang sepenuhnya aman. Peristiwa ini tidak hanya menghadirkan kerugian material, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sebuah lembaga religius dikelola dan diawasi. Kejadian tersebut membuka ruang refleksi bahwa simbol kesalehan tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan struktural dalam menghadapi risiko. Dengan kata lain, religiusitas institusi tidak otomatis menjamin keamanan dan akuntabilitas. Peristiwa tersebut juga memperlihatkan adanya jarak antara persepsi publik dan realitas kelembagaan pesantren. Selama ini, pesantren sering ditempatkan di luar kerangka penilaian kritis yang biasa diterapkan pada institusi pendidikan lain. Sekolah dan perguruan tinggi umumnya tunduk pada standar keselamatan dan audit yang ketat, sementara pesantren kerap diperlakukan secara berbeda karena statusnya sebagai lembaga keagamaan. Perlakuan yang tidak setara ini justru berpotensi menciptakan kerentanan struktural, karena pesantren berkembang tanpa pendampingan dan pengawasan yang memadai.

Dalam konteks sosiologi agama, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial. Legitimasi ini memungkinkan institusi keagamaan memperoleh kepercayaan luas tanpa harus memenuhi standar rasional yang sama dengan institusi sekuler. Namun, ketika legitimasi simbolik tidak diiringi dengan sistem pengelolaan yang bertanggung jawab, maka risiko sosial menjadi tidak terhindarkan. Pesantren, sebagai institusi yang melibatkan banyak individu dalam ruang hidup bersama, menghadapi risiko yang tidak kecil apabila tata kelolanya tidak adaptif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai pesantren perlu diarahkan tidak hanya pada aspek pendidikan dan spiritualitas, tetapi juga pada dimensi institusional dan relasi sosial yang menyertainya. Pendekatan kritis menjadi penting untuk membaca bagaimana nilai religius berinteraksi dengan struktur kekuasaan, sistem kepercayaan, dan praktik pengelolaan. Tanpa pembacaan semacam ini, pesantren akan terus ditempatkan dalam posisi ideal yang sulit disentuh oleh evaluasi akademik maupun kebijakan publik.

Penelitian ini hadir dalam konteks tersebut, dengan menjadikan Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo sebagai titik masuk untuk memahami dinamika kelembagaan

pesantren secara lebih luas. Fokus penelitian tidak diarahkan pada aspek teologis, melainkan pada bagaimana nilai religius dioperasionalkan dalam kehidupan institusi dan bagaimana implikasinya terhadap tata kelola serta keselamatan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menempatkan pesantren sebagai institusi sosial yang nyata, dengan segala kompleksitas, keterbatasan, dan tanggung jawabnya. Melalui pendekatan sosiologi agama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana kritis tentang lembaga keagamaan di Indonesia. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mendeligitimasi pesantren, melainkan untuk mendorong refleksi bersama mengenai pentingnya keseimbangan antara nilai religius dan tanggung jawab institusional. Dengan membaca pesantren secara kontekstual dan kritis, diharapkan muncul pemahaman baru bahwa kesalehan dan akuntabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat dan harus berjalan beriringan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, proses sosial, serta relasi kekuasaan yang bekerja dalam kehidupan pesantren, khususnya terkait internalisasi ketaatan religius sebagai legitimasi kekuasaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial secara kontekstual dan interpretatif, sesuai dengan karakter kajian sosiologi agama.

Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo. Kasus ini dipandang relevan dan representatif untuk mengkaji dinamika relasi antara otoritas religius, ketaatan santri, dan lemahnya kontrol sosial dalam pengelolaan pesantren. Peristiwa ambruknya bangunan pesantren dijadikan sebagai pintu masuk analisis untuk membaca persoalan struktural dan simbolik yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan empiris penelitian yang dianalisis secara kritis dengan menggunakan perspektif sosiologi agama. Pembahasan difokuskan pada bagaimana proses internalisasi ketaatan religius berlangsung dalam kehidupan pesantren, bagaimana otoritas kiai dikonstruksi dan dilegitimasi, serta bagaimana relasi kuasa tersebut berdampak pada lemahnya kontrol sosial dan munculnya krisis kelembagaan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori legitimasi kekuasaan Max Weber dan konsep dominasi simbolik

Pierre Bourdieu.

Internalisasi Ketaatan Religius dalam Praktik Kehidupan Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi ketaatan religius di Pondok Pesantren Al Khoziny berlangsung secara sistematis dan berlapis. Proses ini dimulai sejak santri pertama kali memasuki lingkungan pesantren melalui pengenalan nilai-nilai dasar seperti taat kepada kiai, patuh terhadap peraturan pesantren, dan menjaga adab dalam berinteraksi. Nilai-nilai tersebut diperkuat melalui kegiatan pembelajaran formal, pengajian rutin, serta praktik ritual keagamaan yang dilakukan secara kolektif.

Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan religius tidak hanya diajarkan sebagai kewajiban moral, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk kesalehan yang memiliki nilai spiritual tinggi. Santri didorong untuk menempatkan kepatuhan kepada kiai sebagai bagian dari ibadah, sehingga sikap menerima perintah dan kebijakan pesantren dianggap sebagai tindakan religius yang bernilai pahala. Proses ini membentuk kesadaran santri bahwa mempertanyakan otoritas kiai bukanlah tindakan yang lazim, bahkan dapat dipersepsikan sebagai bentuk ketidaktaatan.

Dari perspektif Bourdieu, proses tersebut membentuk habitus kepatuhan yang tertanam kuat dalam diri santri. Habitus ini tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga cara berpikir dan merespons realitas sosial. Akibatnya, ketaatan religius berfungsi sebagai mekanisme simbolik yang mereproduksi relasi kuasa secara halus dan berkelanjutan.

Dalam kehidupan pesantren, ketaatan religius tidak hadir sebagai konsep abstrak yang diajarkan secara teoritis, melainkan diwujudkan melalui praktik keseharian yang bersifat rutin, berulang, dan terstruktur. Di Pondok Pesantren Al Khoziny, nilai ketaatan ditanamkan melalui pola hidup kolektif yang mengatur hampir seluruh aktivitas santri, mulai dari bangun tidur, belajar, beribadah, hingga berinteraksi sosial. Pola hidup ini secara tidak langsung membentuk cara pandang santri terhadap otoritas, disiplin, dan kepatuhan, di mana mengikuti aturan pesantren dipahami sebagai bagian dari keteraturan hidup religius yang ideal.

Proses internalisasi ketaatan berlangsung melalui mekanisme pembiasaan yang bersifat praksis. Santri dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan pesantren yang menuntut kepatuhan terhadap jadwal, tata tertib, dan arahan pengelola. Dalam konteks ini, ketaatan tidak selalu disampaikan dalam bentuk doktrin eksplisit,

tetapi dilembagakan melalui rutinitas yang dijalani secara kolektif. Kegiatan yang dilakukan secara berulang menciptakan standar perilaku yang dianggap normal, sehingga kepatuhan menjadi kebiasaan yang dijalankan tanpa banyak refleksi.

Selain melalui rutinitas, internalisasi ketaatan religius juga dibangun melalui simbol dan representasi moral. Lingkungan pesantren dipenuhi dengan simbol-simbol keagamaan yang memperkuat kesan sakralitas ruang dan aktivitas di dalamnya. Simbol tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa kehidupan pesantren berada dalam kerangka nilai religius yang menuntut keteraturan dan kepatuhan. Dalam kondisi ini, pelanggaran terhadap aturan pesantren tidak hanya dipahami sebagai kesalahan administratif, tetapi juga sebagai penyimpangan moral yang berimplikasi pada kualitas keberagamaan individu.

Ketaatan religius juga diproduksi melalui relasi sosial yang asimetris antara santri dan otoritas pesantren. Struktur sosial pesantren menempatkan santri pada posisi sebagai pihak yang belajar dan mengikuti, sementara otoritas berada pada posisi memberi arahan dan menentukan kebijakan. Relasi ini menciptakan pola interaksi satu arah, di mana inisiatif dan pengambilan keputusan lebih banyak bersumber dari pihak otoritas. Dalam struktur semacam ini, ketaatan dipersepsikan sebagai sikap yang selaras dengan peran sosial santri, sedangkan sikap mempertanyakan dianggap menyimpang dari peran tersebut.

Proses ini secara perlahan membentuk normalisasi kepatuhan, di mana santri belajar untuk menahan diri dari sikap kritis demi menjaga keteraturan dan keharmonisan lingkungan pesantren. Ketaatan menjadi nilai yang tidak perlu diperdebatkan karena telah melebur dalam sistem kehidupan sehari-hari. Bahkan, dalam banyak situasi, santri tidak menyadari bahwa mereka sedang menjalani proses pembentukan kepatuhan, karena nilai tersebut telah menyatu dengan pengalaman hidup mereka di pesantren. Dalam konteks ini, ketaatan religius tidak hanya membentuk perilaku individual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sosial. Ketaatan membantu menjaga stabilitas internal pesantren dengan meminimalkan potensi konflik dan perbedaan pendapat. Namun, stabilitas tersebut dicapai dengan mengorbankan ruang refleksi kritis. Ketika kepatuhan menjadi norma utama, kemampuan santri untuk menilai kebijakan pesantren secara rasional dan kontekstual menjadi terbatas.

Lebih jauh, internalisasi ketaatan religius juga membentuk pola penerimaan terhadap kondisi struktural pesantren. Santri cenderung menerima situasi yang ada sebagai bagian dari konsekuensi hidup religius, termasuk keterbatasan fasilitas maupun risiko yang menyertainya. Sikap menerima ini diperkuat oleh pandangan bahwa kehidupan pesantren merupakan ruang pembentukan diri yang menuntut kesabaran, keikhlasan, dan kepatuhan. Dalam kerangka tersebut, ketidaknyamanan atau persoalan struktural jarang diposisikan sebagai masalah kelembagaan yang perlu dievaluasi secara kritis.

Dengan demikian, internalisasi ketaatan religius dalam praktik kehidupan pesantren bekerja melalui mekanisme yang halus namun efektif, yakni pembiasaan, normalisasi, dan pembingkai moral terhadap kepatuhan. Proses ini menghasilkan santri yang disiplin dan terikat secara emosional pada nilai religius, tetapi sekaligus berpotensi melemahkan daya kritis terhadap pengelolaan kelembagaan. Dalam konteks Pondok Pesantren Al Khoziny, kuatnya internalisasi ketaatan tersebut menjadi faktor penting yang membentuk pola penerimaan tanpa pertanyaan terhadap berbagai keputusan pesantren, termasuk yang berkaitan dengan aspek struktural dan keselamatan. Oleh karena itu, internalisasi ketaatan religius perlu dipahami sebagai proses sosial yang memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi pembentukan karakter santri, tetapi juga bagi dinamika kekuasaan dan tata kelola pesantren secara keseluruhan.

Konstruksi Otoritas Kiai sebagai Kekuasaan Karismatik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas kiai di Pondok Pesantren Al Khoziny dikonstruksi terutama melalui pola kekuasaan karismatik sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber. Kekuasaan karismatik muncul dari keyakinan pengikut terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin, baik berupa kesalehan personal, kedalaman spiritual, maupun kemampuan religius yang dipersepsikan melampaui individu lain. Dalam konteks pesantren, kiai tidak sekadar diposisikan sebagai pengajar agama, tetapi sebagai figur sentral yang merepresentasikan otoritas keilmuan, moral, dan spiritual sekaligus.

Karisma kiai dibentuk melalui proses sosial yang panjang dan berlapis. Riwayat keilmuan, silsilah keagamaan, serta narasi tentang kealiman dan kesalehan kiai berperan penting dalam membangun legitimasi tersebut. Cerita-cerita mengenai keteladanan hidup, penguasaan kitab kuning, hingga kemampuan spiritual tertentu

berfungsi sebagai simbol yang memperkuat citra karismatik kiai di mata santri dan masyarakat. Narasi ini direproduksi secara terus-menerus melalui pengajian, tradisi lisan, dan relasi sosial pesantren.

Konstruksi otoritas karismatik ini diperkuat oleh struktur sosial pesantren yang bersifat hierarkis. Relasi antara kiai, ustaz, dan santri tidak dibangun atas dasar kesetaraan, melainkan pada prinsip kepatuhan dan penghormatan. Dalam struktur tersebut, kiai berada pada posisi puncak otoritas, sementara santri ditempatkan sebagai subjek yang belajar, mengabdikan, dan patuh. Pola relasi ini menciptakan jarak simbolik yang semakin meneguhkan posisi kiai sebagai figur yang sulit dipertanyakan.

Dalam praktiknya, kekuasaan karismatik kiai tidak hanya beroperasi dalam ranah keagamaan, tetapi juga meluas ke ranah kelembagaan dan sosial. Keputusan-keputusan strategis terkait pengelolaan pesantren, pembangunan fisik, hingga pengaturan kehidupan santri sering kali bersandar pada otoritas personal kiai. Mekanisme musyawarah dan prosedur administratif cenderung bersifat formalitas, sementara keputusan final tetap berada di tangan kiai sebagai pemegang legitimasi tertinggi.

Mengacu pada Weber, kekuasaan karismatik memiliki karakter yang personal dan tidak terlembagakan secara rasional. Kekuatan utama otoritas ini terletak pada kepercayaan dan loyalitas pengikut, bukan pada aturan tertulis atau sistem hukum yang baku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap figur kiai menyebabkan lemahnya institusionalisasi tata kelola pesantren. Akibatnya, fungsi kontrol dan akuntabilitas kelembagaan tidak berkembang secara optimal.

Lebih jauh, otoritas karismatik kiai juga berkelindan dengan dimensi simbolik yang memperkuat dominasi. Kiai dipersepsikan sebagai representasi kebenaran religius, sehingga kritik terhadap kebijakan pesantren berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk ketidaktaatan atau bahkan penyimpangan moral. Kondisi ini mempersempit ruang diskursus kritis dan mendorong penerimaan pasif terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh otoritas pesantren. Dalam konteks kasus Pondok Pesantren Al Khoziny, dominannya kekuasaan karismatik tanpa diimbangi dengan sistem legal-rasional menjadi salah satu faktor struktural yang berkontribusi pada rapuhnya tata kelola lembaga. Ketika otoritas personal lebih diutamakan daripada prosedur teknis dan standar keselamatan, risiko kelembagaan cenderung diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa karisma, meskipun memiliki daya integratif yang kuat, juga menyimpan potensi problematik ketika tidak

diiringi dengan mekanisme rasionalisasi dan kontrol sosial.

Dengan demikian, konstruksi otoritas kiai sebagai kekuasaan karismatik dalam pesantren perlu dipahami secara kritis. Otoritas ini bukan sekadar fenomena individual, melainkan hasil dari relasi sosial, struktur hierarkis, dan sistem makna religius yang direproduksi secara kolektif. Analisis ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan pesantren memerlukan upaya menyeimbangkan kekuasaan karismatik dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan rasionalitas organisasi.

Ketaatan, Ketakutan, dan Lemahnya Kontrol Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan religius yang terinternalisasi kuat dalam kehidupan pesantren tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan munculnya rasa ketakutan sosial dan simbolik di kalangan santri maupun masyarakat sekitar. Ketaatan yang pada awalnya dimaknai sebagai nilai moral dan spiritual perlahan berkembang menjadi mekanisme pengendalian perilaku yang efektif. Santri dibiasakan untuk menerima perintah, aturan, dan kebijakan pesantren tanpa banyak ruang untuk mempertanyakan dasar maupun implikasinya.

Ketakutan yang muncul bukan bersifat fisik atau represif, melainkan bersifat simbolik dan moral. Santri dan masyarakat merasa khawatir dicap sebagai individu yang tidak patuh, tidak beradab, atau kurang beriman apabila mengajukan kritik terhadap otoritas kiai atau pengelolaan pesantren. Dalam konteks ini, kritik tidak dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, tetapi cenderung dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap norma religius dan etika pesantren. Kondisi tersebut menciptakan iklim sosial yang minim dialog kritis. Santri lebih memilih diam dan menyesuaikan diri, sementara masyarakat menyerahkan sepenuhnya urusan pengelolaan pesantren kepada otoritas internal. Ketaatan dan ketakutan simbolik bekerja sebagai dua sisi mata uang yang saling memperkuat, sehingga membentuk relasi kuasa yang asimetris dan sulit digugat. Situasi ini menunjukkan bahwa kontrol sosial tidak dijalankan secara partisipatif, melainkan tersubstitusi oleh kepatuhan moral.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, fenomena ini dapat dibaca sebagai praktik kekerasan simbolik, yaitu bentuk dominasi yang diterima sebagai kewajaran oleh pihak yang didominasi. Kekuasaan tidak dijalankan melalui paksaan langsung, tetapi melalui internalisasi nilai dan makna yang membentuk cara berpikir individu. Santri tidak merasa sedang ditekan, karena ketaatan telah menjadi bagian dari habitus religius yang

dipraktikkan sehari-hari. Lemahnya kontrol sosial menjadi konsekuensi langsung dari kondisi tersebut. Mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pesantren, termasuk yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan tata kelola, tidak berjalan secara efektif. Tidak adanya budaya kritik dan evaluasi membuat potensi masalah struktural terabaikan. Pengelolaan lembaga lebih bergantung pada kepercayaan personal terhadap figur kiai dibandingkan pada standar teknis atau prosedural yang jelas.

Dalam kerangka Weberian, kondisi ini menunjukkan absennya sistem legal-rasional yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan karismatik. Ketika aturan formal dan mekanisme pertanggungjawaban tidak berkembang, kekuasaan personal menjadi dominan dan sulit dikontrol. Akibatnya, relasi kuasa yang timpang berpotensi melahirkan kelalaian institusional yang berdampak luas.

Dengan demikian, ketaatan dan ketakutan simbolik yang tidak diimbangi dengan kontrol sosial yang memadai dapat menjadi faktor risiko dalam pengelolaan pesantren. Temuan ini menegaskan bahwa nilai ketaatan religius, meskipun penting dalam pembentukan etika dan moral, perlu dikelola secara reflektif agar tidak berubah menjadi mekanisme dominasi yang menutup ruang kritik dan melemahkan akuntabilitas kelembagaan.

Ambruknya Pesantren sebagai Krisis Legitimasi Kekuasaan Religius

Peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny merupakan momen krusial yang membuka lapisan terdalam relasi kekuasaan religius yang sebelumnya berjalan relatif tanpa pertanyaan. Kejadian ini tidak hanya dapat dipahami sebagai kecelakaan teknis atau kegagalan konstruksi semata, melainkan sebagai peristiwa sosial yang mengungkap krisis legitimasi dalam pengelolaan kekuasaan religius. Dampak material yang nyata berupa kerusakan fisik dan ancaman keselamatan menjadi titik balik yang mengguncang kepercayaan simbolik terhadap otoritas pesantren.

Dalam perspektif Max Weber, legitimasi kekuasaan karismatik bergantung pada kemampuan pemimpin untuk memenuhi ekspektasi moral dan sosial pengikutnya. Ketika kiai dipersepsikan sebagai figur yang memiliki keunggulan spiritual dan moral, maka pengikut memberikan kepercayaan penuh terhadap keputusan dan kepemimpinannya. Namun, peristiwa ambruknya pesantren menunjukkan kegagalan pemenuhan tanggung jawab tersebut, terutama dalam aspek perlindungan dan keselamatan santri. Kondisi ini menandai melemahnya basis legitimasi karismatik yang sebelumnya diterima tanpa

kritik.

Krisis legitimasi ini semakin tampak ketika simbol-simbol religius tidak lagi mampu meredam pertanyaan dan keresahan publik. Nilai ketaatan dan kepatuhan yang sebelumnya berfungsi sebagai perekat sosial mulai kehilangan daya ikatnya ketika berhadapan dengan realitas material yang merugikan. Dalam situasi ini, kepercayaan emosional dan religius terhadap otoritas kiai mengalami erosi, karena karisma tidak lagi sejalan dengan kapasitas pengelolaan lembaga secara bertanggung jawab.

Dari perspektif Pierre Bourdieu, runtuhnya bangunan pesantren dapat dibaca sebagai momen ketika dominasi simbolik dan kekerasan simbolik kehilangan efektivitasnya. Kekuasaan simbolik bekerja selama realitas sosial dapat diselaraskan dengan sistem makna yang dikonstruksikan. Namun, ketika konsekuensi material yang serius muncul, seperti ancaman keselamatan jiwa, sistem simbolik tidak lagi mampu menutupi ketimpangan relasi kuasa dan kelalaian struktural. Pada titik ini, apa yang sebelumnya diterima sebagai kewajiban mulai dipertanyakan secara terbuka.

Peristiwa ambruknya pesantren juga menyingkap lemahnya sistem legal-rasional dalam tata kelola lembaga keagamaan. Ketergantungan yang tinggi pada otoritas personal kiai tanpa diimbangi dengan prosedur teknis, standar keselamatan, dan mekanisme pengawasan yang memadai memperbesar risiko kelembagaan. Ketika krisis terjadi, ketiadaan sistem formal yang kuat membuat proses pertanggungjawaban menjadi kabur dan sulit dilakukan secara transparan.

Dengan demikian, ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny merupakan manifestasi dari krisis legitimasi kekuasaan religius yang bersifat struktural, bukan insidental. Peristiwa ini menunjukkan batas-batas kekuasaan karismatik dan dominasi simbolik ketika tidak disertai dengan rasionalisasi organisasi dan kontrol sosial yang efektif. Krisis ini sekaligus menjadi cermin bagi pesantren sebagai institusi sosial-keagamaan untuk merefleksikan kembali relasi antara otoritas religius, akuntabilitas kelembagaan, dan keselamatan publik.

Analisis ini menegaskan bahwa keberlanjutan legitimasi kekuasaan religius tidak dapat hanya bertumpu pada karisma dan simbol kesalehan, tetapi memerlukan penguatan sistem legal-rasional yang menjamin tanggung jawab, transparansi, dan perlindungan terhadap seluruh warga pesantren. Tanpa upaya tersebut, kekuasaan religius berpotensi terus berada dalam kondisi rentan terhadap krisis legitimasi serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketaatan religius dalam kehidupan pesantren tidak semata-mata berfungsi sebagai nilai moral dan spiritual, tetapi juga beroperasi sebagai mekanisme sosial yang berperan dalam membentuk dan melanggengkan relasi kekuasaan. Melalui proses internalisasi yang berlangsung secara sistematis, ketaatan direproduksi sebagai praktik sosial yang menempatkan kiai pada posisi otoritas tertinggi dan sulit dipertanyakan. Dalam konteks ini, kekuasaan religius tidak bekerja melalui paksaan langsung, melainkan melalui pengakuan, kepercayaan, dan kepatuhan yang diterima sebagai kewajiban.

Menggunakan perspektif Max Weber, penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas kiai di Pondok Pesantren Al Khoziny terutama bertumpu pada legitimasi karismatik. Karisma kiai dibangun melalui narasi kesalehan, kedalaman ilmu agama, serta posisi simbolik dalam struktur pesantren. Namun, legitimasi karismatik tersebut tidak diimbangi dengan penguatan sistem legal rasional yang memadai. Ketergantungan yang tinggi pada figur kiai menyebabkan lemahnya institusionalisasi tata kelola pesantren dan terbatasnya mekanisme akuntabilitas.

Sementara itu, melalui pendekatan Pierre Bourdieu, penelitian ini menemukan bahwa dominasi simbolik memainkan peran penting dalam mereproduksi relasi kuasa di pesantren. Ketaatan religius dan penghormatan terhadap otoritas kiai terinternalisasi dalam habitus santri, sehingga membentuk ketakutan simbolik terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Kekerasan simbolik bekerja secara halus dengan menjadikan kepatuhan sebagai norma moral, sekaligus menutup ruang refleksi kritis dan kontrol sosial.

Peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny menjadi titik balik yang menyingkap batas-batas kekuasaan religius berbasis karisma dan simbol. Kejadian tersebut memunculkan krisis legitimasi, di mana kepercayaan simbolik tidak lagi mampu menutupi konsekuensi material dari kelalaian struktural. Krisis ini menunjukkan bahwa kekuasaan religius, apabila tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang akuntabel dan rasional, berpotensi menimbulkan risiko sosial yang serius.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penegasan bahwa studi pesantren perlu dibaca tidak hanya sebagai kajian pendidikan dan moralitas, tetapi juga sebagai arena relasi kuasa yang kompleks. Integrasi perspektif Weber dan Bourdieu memungkinkan

pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana legitimasi dan dominasi bekerja secara simultan dalam institusi keagamaan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian sosiologi agama dengan menempatkan pesantren sebagai institusi religius yang sarat dinamika kekuasaan simbolik.

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola pesantren melalui pengembangan sistem legal-rasional yang transparan dan akuntabel, tanpa meniadakan peran otoritas religius kiai. Ketaatan religius perlu dikelola secara reflektif agar tidak berubah menjadi mekanisme pembungkaman kritik. Penguatan budaya evaluasi, partisipasi, dan kontrol sosial menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan, keberlanjutan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pesantren.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan pengembangan analisis dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa pesantren sebagai institusi religius tidak hanya berfungsi sebagai ruang pendidikan spiritual, tetapi juga sebagai arena sosial tempat nilai, otoritas, dan kekuasaan diproduksi serta direproduksi secara berkelanjutan. Seluruh tambahan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pesantren tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang bekerja melalui mekanisme simbolik, kultural, dan struktural sekaligus.

Internalisasi ketaatan religius yang berlangsung dalam kehidupan pesantren terbukti bukan sekadar proses pembentukan moral individual, melainkan juga mekanisme sosial yang membentuk pola kepatuhan kolektif. Ketaatan yang ditanamkan secara berulang melalui praktik keseharian, simbol religius, dan struktur hierarkis telah menciptakan orientasi kepatuhan yang kuat, sehingga relasi antara santri dan otoritas pesantren cenderung berjalan satu arah. Dalam kondisi tersebut, nilai religius tidak hanya mengarahkan perilaku, tetapi juga mengatur batas-batas wacana, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dipertanyakan.

Pengembangan analisis juga memperlihatkan bahwa kuatnya otoritas karismatik kiai, ketika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang rasional dan akuntabel, berpotensi melahirkan ketimpangan relasi kuasa. Kekuasaan yang dilegitimasi secara simbolik mampu bertahan lama karena diterima sebagai kewajiban moral, namun pada saat yang sama menempatkan pesantren dalam kondisi rentan terhadap kelalaian struktural. Situasi ini diperparah oleh lemahnya kontrol sosial, baik dari internal pesantren maupun dari masyarakat sekitar, yang cenderung menyerahkan

sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan kepada otoritas religius.

Peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny menjadi titik krusial yang mengungkap akumulasi dari proses tersebut. Kejadian ini tidak sekadar merepresentasikan kegagalan teknis, tetapi menandai retaknya legitimasi simbolik yang selama ini menopang kekuasaan religius. Dampak material yang nyata memperlihatkan bahwa legitimasi berbasis karisma dan kepercayaan moral memiliki batas, terutama ketika tidak disertai dengan tanggung jawab kelembagaan yang memadai.

Dengan demikian, keseluruhan tambahan analisis dalam penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan pesantren sebagai institusi sosial-keagamaan menuntut adanya keseimbangan antara nilai ketaatan religius dan rasionalitas kelembagaan. Ketaatan perlu dipahami sebagai nilai etis yang membangun kedisiplinan dan spiritualitas, bukan sebagai mekanisme yang menutup ruang evaluasi dan kritik. Penguatan sistem tata kelola, transparansi, serta budaya refleksi kritis menjadi prasyarat penting agar pesantren tidak hanya kuat secara simbolik, tetapi juga kokoh secara struktural dan bertanggung jawab secara sosial.

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa pesantren sebagai institusi religius tidak berada di luar dinamika sosial dan relasi kekuasaan yang membentuk kehidupan kolektif. Ketaatan religius yang selama ini dipahami sebagai fondasi moral terbukti memiliki dimensi sosial yang kompleks, karena ia dapat berfungsi sekaligus sebagai sumber etika dan mekanisme legitimasi kekuasaan. Kasus Pondok Pesantren Al Khoziny menunjukkan bahwa ketika ketaatan dilembagakan tanpa disertai rasionalitas pengelolaan dan ruang refleksi kritis, legitimasi religius berpotensi kehilangan daya protektifnya di hadapan risiko sosial yang nyata. Oleh karena itu, masa depan pesantren menuntut upaya berkelanjutan untuk merawat keseimbangan antara otoritas keagamaan, tanggung jawab kelembagaan, dan keselamatan manusia sebagai nilai utama yang tidak dapat dinegosiasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, F. K., Ikhsan, M. A., Hanafi, Y., & Adzim, A. (2021). Internalisasi nilai karakter religius nasionalis untuk mencegah paham transnasional radikal di Indonesia dan Jerman. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 145–160.
- Atin, S., & Maemonah, M. (2022). Internalisasi nilai-nilai karakter religius melalui pembelajaran akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian*

Pendidikan Agama dan Keagamaan, 20(3), 317–330.

- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Cahyadi, R. A. H. (2020). Pola kepemimpinan di pesantren. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 5(1), 45–58.
- Cowan, C. (Ed.). (2020). *Religion and power: Theology in the age of empire*. Fortress Academic.
- Farleni, F., Hidayat, S., & Jamaludin, U. (2023). Internalisasi nilai karakter religius melalui budaya sekolah. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 210–222.
- Fitriatin, N., Sukarno, & Rahayu, N. W. I. (2024). Michel Foucault's critical discourse analysis of controversy news in Islamic boarding schools. *Journal of Islamic Education*, 9(1), 1–15.
- Habibah, I. L., & Sutomo. (2022). Strategi internalisasi nilai-nilai Islam wasathiyah dalam membentuk masyarakat religius. *Proceedings of Islamic Education Seminar*, 2(1), 88–97.
- Hariyanto, & Tamam, B. (2021). Konsepsi dan internalisasi nilai power and authority dalam pendidikan pesantren. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 15(2), 255–270.
- Lesmana, B., Fatimah, N., & Gustaman, F. A. (2023). Internalisasi nilai-nilai religius Islam pada remaja dalam organisasi kepemudaan. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 7(2), 180–195.
- Magalhães, P. T. (2021). *The legitimacy of modern democracy: A study on the political thought of Max Weber, Carl Schmitt and Hans Kelsen*. Routledge.
- Murvar, V. (Ed.). (1985). *Theory of liberty, legitimacy and power*. Routledge.
- Mustofa, A., & Syah, M. (2019). Pesantren sebagai benteng ideologi Pancasila. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(1), 1–14.
- Priyanto, J. (2018). Wacana, kuasa, dan agama dalam kontestasi Pilgub Jakarta. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 19(2), 233–250.
- Ramdhani, K., & Nursyabani, A. (2021). Internalisasi sikap religius siswa melalui pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 60–72.
- Swartz, D. (1996). Bridging the study of culture and religion: Pierre Bourdieu's political economy of symbolic power. *Sociology of Religion*, 57(1), 71–85.

- Syafiuddin, A. (2022). Pengaruh kekuasaan atas pengetahuan: Memahami relasi kuasa Michel Foucault. *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 18(2), 145–158.
- Taryudi, & Setiawan, T. (2021). Tafsir dan politik kekuasaan di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(1), 45–56.
- Wahzudi, M., & Ariyansyah, Z. (2022). Internalisasi karakter religius dan kepemimpinan siswa melalui kegiatan pramuka. *Tarunateach: Journal of Elementary School*, 2(2), 101.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.